

**PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
DI DESA DURIAN, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA**Dodi Alfaed<sup>1</sup>, Arkanudin<sup>2</sup>, Monika Maya<sup>3</sup>, Siti Aminah<sup>4</sup>, Marini<sup>5</sup>, Riyana Ramadani Putri<sup>6</sup>, Yazid Zibran<sup>7</sup><sup>1-7</sup> FISIP, Universitas TanjungpuraEmail: E1022211003@student.untan.ac.id; arkanudin@fisip.untan.ac.id;  
E1022211051@student.untan.ac.id; siti Aminah@hukum.untan.ac.id; Marini@fisip.untan.ac.id;  
E1022211042@student.untan.ac.id; E1022211030@student.untan.ac.id**Artikel histori:**Submit: 01-11-2023  
Revisi: 24-05-2024  
Diterima: 18-06-2024  
Terbit: 24-06-2024**Kata Kunci:***development,  
APBDes,  
the role of NGOs,  
society participation***Korespondensi:**

E1022211003@student.untan.ac.id

**Abstract:** *Infrastructure development is the government's responsibility towards the community, but in reality the infrastructure growth carried out by the government is gradual, this gives rise to unequal development in each region which has an impact on unequal road development. This research was conducted because of uneven development in Durian Village, while based on the APBDes, the priority development in the village is infrastructure. The aim of the research is to describe the roles played by the community in building roads. This research method uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, determining informants using a purposive sampling technique consisting of 5 people. The results of research on the role of NGOs in the form of deliberation and fundraising carried out by the community are mutual cooperation, contributions and cooperation with NGOs. The role of NGOs and communities in the road construction process.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti untuk menaikkan angka kelayakan hidup agar masyarakat dapat hidup mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur yaitu jalan sebagai akses mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan jalan menjadi bagian dalam agenda pembangunan daerah (Rasadi et al., 2020).

Pembangunan daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2018 hingga 2023, seperti pada pelaksanaan pembangunan jalan sudah terwujud hingga 72,28%, angka ini meningkat dari pembangunan jalan sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2013-2017 dengan angka keberhasilan yang hanya mencapai 49% (Munir, 2023). Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga demikian ikut serta dalam mewujudkan program pembangunan daerah Kalimantan Barat, melalui program pembangunan jangka menengah, melaksanakan pembangunan jalan yang berfokus pada jalan-jalan poros antar daerah di wilayah Kubu Raya, sedangkan jalan-jalan yang berada di desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa melalui APBDes (Anggaran Pembangunan Desa) (Siregar, 2023).

Alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui APBDes di setiap desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan jalan desa dengan baik, berpedoman pada tiga prioritas pembangunan infrastruktur menggunakan APBDes yaitu jalan, jembatan dan irigasi (Perkasa, 2016). Namun, kenyataannya masih banyak desa yang memiliki jalan tidak layak (rusak) (Sawelet et al., 2022), salah satunya adalah Desa Durian yang berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Desa Durian memiliki 5 dusun yaitu Sela, Bale, Durian, Siak dan Alena, dari ke lima dusun tersebut terdapat satu dusun yang memiliki masalah pembangunan jalan yaitu di Dusun Bale, lebih tepatnya di RT 06/RW 02 yang belum mendapatkan anggaran dari desa untuk memperbaiki jalan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan protes, menyuarakan pendapat kepada kepala dusun bahkan ke kepala desa, tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah desa. Upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil sementara jalan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam melakukan mobilisasi, oleh karena itu masyarakat melakukan gotong royong untuk membangun (memperbaiki jalan) tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan jalan di Dusun Bale tersebut, menarik untuk diteliti mengingat rata-rata masyarakat memiliki ekonomi yang dibawah rata-rata (pra sejahtera dan menengah ke bawah) dengan mata pencaharian buruh tani dan pekebun.

Penelitian tentang peran dalam pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan diantaranya oleh Rianto et al., (2022) yang menunjukkan hasil bahwa peran Pemerintah Kelurahan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Amal Bakti belum mencapai tingkat optimal, karena masih banyaknya infrastruktur yang mengalami kerusakan, meskipun pemerintah telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan prioritas pembangunan, namun terdapat sejumlah pembangunan yang dilakukan tanpa melalui musyawarah tersebut. Selain itu, sering dijumpai kendala seperti kurangnya sosialisasi program atau minimnya partisipasi dari masyarakat desa dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah. Penelitian kedua dilakukan oleh Ismatullah & Mahendra, (2021a) hasil dari penelitian tersebut partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaliginting berupa pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat,

dan keempat partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung seperti aspek ekonomi, aspek kesadaran, dan aspek pendidikan dan faktor penghambat penggunaan bahu jalan desa untuk kepentingan pribadi, meskipun demikian, hambatan ini tidak menyebabkan penundaan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung. Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Sadikin et al., (2021) hasil penelitian tersebut menunjukkan peran pemerintah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tercermin dari kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene di Kecamatan Ulumanda dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 yang disusun oleh BAPPEDA. Rencana tersebut juga mengarahkan pada tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene untuk periode 2018-2023.

Penelitian tentang peran dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan banyak dilakukan, namun kebanyakan penelitian tentang peran dari lembaganya (pemerintah), partisipasi masyarakat dan jarang yang meneliti tentang peran dari masyarakat, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada objek dan lokasi penelitiannya dan peran masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Konsep Peran**

Peran merupakan suatu tindakan atau perubahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu kelompok demi mewujudkan tanggung jawab individu sebagai pelaku perubahan di dalam kelompok tersebut (Juwita et al., 2019). Peran juga bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau beberapa orang dalam proses perubahan yang ada di sekitarnya. Adanya keikutsertaan seseorang atau beberapa orang dalam proses kegiatan pembangunan memberikan manfaat untuk masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari program-program sosial yang telah direncanakan oleh pemerintah (Riyanto, 2023). Menurut (Sinaga, 2020) masyarakat memiliki peran dalam tata ruang bersama pemerintah melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan demi mewujudkan proses pembangunan yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang disepakati, serta berlandaskan pada pendekatan *bottom-up*.

### **Konsep Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam mengemukakan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan mereka dalam proses pemerintahan daerah (Ismatullah & Mahendra, 2021). Penelitian ini mengkaji turut sertanya masyarakat dalam pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa agar bisa memaksimalkan proses pembangunan yang

direncanakan, adanya usaha seseorang dalam mengenali masalah dan potensi yang ada di kelompoknya (Mentari, 2017).

Perencanaan pembangunan wilayah terutama di daerah pedesaan menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Implementasi RPJM dapat berhasil jika dalam proses pembuatannya melibatkan masyarakat yang mengetahui tentang kebutuhannya sehingga tepat sasaran dan tepat manfaat, termasuk dalam proses penyusunan APBDes (Adeliya et al., 2017). Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Durian pertama dibentuk dengan dasar dari musyawarah dusun (musdus) yang memiliki tujuan menjangkau aspirasi masyarakat tentang permasalahan yang ada di setiap dusun yang nantinya akan menjadi tanggungjawab kepala dusun (jika kegiatan tersebut dianggarkan dalam APDes), setelah semua dusun melakukan musyawarah dan menentukan apa saja yang diperlukan di dusunnya masing-masing, maka usulan tersebut akan di musyawarahkan di forum musyawarah rencana pengembangan desa (musrenbangdes) dari hasil musyawarah tersebut yang akan menjadi dasar penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes di Desa Durian melibatkan beberapa unsur keterwakilan masyarakat seperti Kepala Desa Durian beserta jajarannya, BPD, RT, kepala dusun, tokoh pemuda, tokoh adat, pemuka agama dan LSM.

Gambar 1. Musyawarah Desa Durian penetapan APBDes



### Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Mengawasi dan ikut serta merancang program atau kebijakan pembangunan demi kepentingan masyarakat merupakan salah satu peran dari LSM (Afriska, 2017). LSM dan Masyarakat mencari ide dan solusi demi memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama untuk menciptakan kemandirian kelompok yang diberdayakan melalui program yang dibuat oleh LSM. Kemandirian masyarakat akan terlihat saat proses pembangunan yang berhasil diciptakan oleh LSM, jika masyarakat melakukan sesuai dengan yang direncanakan dan berperan aktif dalam kegiatan berjalan untuk sesuai keinginan bersama (Silmi, 2017). LSM berperan untuk menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah, mencari apa yang diperlukan oleh masyarakat dan memperhatikan kinerja pemerintah

dalam pembangunan untuk memenuhi keperluan individu agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Herdiansah, 2016).

Terdapat penelitian terdahulu tentang peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Margayaningsih,2018), hasilnya menjelaskan mengenai proses, metode, dan tindakan yang mengarah pada pemberdayaan, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak melalui pemikiran, usaha, atau inisiatif dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi material maupun spiritual, dengan tujuan mencapai tujuan dari pembentukan suatu bangsa. Penelitian lainnya yang berjudul Studi Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya (studi kasus Kecamatan Sungai Ambawang), hasil dari penelitian ini menjelaskan prioritas infrastruktur berupa aksesibilitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang berada di Desa Durian, Desa Puguk, Desa Bengkarek, Desa Pasak, Desa Teluk Bakung (Simajuntak et al ., 2016).

Adapun penelitian tentang kondisi pembangunan Desa Durian (Regy, 2016). Mendeskripsikan pembangunan yang ada di Desa Durian dengan keadaan ekonomi dan kesehatan yang ada di sana dengan menjelaskan perbedaan status IDM dari 2019 hingga 2020 yang menyatakan Desa Durian termasuk desa yang maju. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan desa, namun belum ada penelitian di Desa Durian tentang peran masyarakat dalam pembangunan jalan, oleh karena itu peneliti memilih untuk mengkaji peran masyarakat dalam pembangunan jalan yang ada di Desa Durian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik deskriptif dan cenderung mengutamakan analisis, melalui pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan situasi lapangan secara mendetail (Creswell, 2017) .

Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini digunakan karena peneliti telah menentukan kriteria dari informan yaitu berdomisili di Dusun Bale minimal 10 tahun terakhir, mengikuti program Pembangunan Masyarakat Desa Durian minimalnya 1 tahun, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama LSM. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Kepala Desa Durian, Kepala RT, Anggota LSM dan dua Warga RT 06/RW 02 yang memenuhi kriteria.

Adapun teknik pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Miles & Saldana, 2014) dengan tahapan sebagai berikut; pertama pengumpulan data melalui observasi datang dan melihat langsung lokasi penelitian, wawancara mendalam yang dilakukan kepada semua informan sehingga mendapatkan data yang valid dan kaya akan informasi dan dokumentasi yang didapatkan melalui pengambilan gambar oleh peneliti maupun gambar yang berasal dari informan, kedua reduksi data, ketiga penyajian data dan keempat penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Profil Dusun Bale

Nama Desa Durian berasal dari kebiasaan penduduk setempat menanam pohon durian, oleh karena itu, penduduk yang datang dan tinggal di wilayah ini menyebut tempat ini sebagai Desa Durian. Penamaan Desa Durian dilakukan pada tahun 1971, desa ini merupakan desa dengan populasi multietnis, di mana banyak penduduknya hidup berbaur. Meskipun ada potensi konflik, prinsip-prinsip sosial budaya yang telah berkembang memungkinkan penduduk dari delapan suku yang berbeda untuk mempertahankan stabilitas hubungan dan suasana keakraban. Proses interaksi sosial antar warga dari berbagai suku mengalami dinamika seiring berjalannya waktu, yang pada akhirnya menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Beberapa suku yang tinggal di Desa Durian antara lain Tionghoa-Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Arab, Batak, dan Melayu.

Kondisi demografi Desa Durian menunjukkan jumlah penduduk total sebanyak 6.066 jiwa yang terdiri dari 1.494 Kepala Keluarga. Dari total tersebut, terdapat 2.958 penduduk laki-laki dan 3.108 penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan dusun di Desa Durian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Durian

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Sela	1776	779	977
2	Dusun Bale	1496	673	823
3	Dusun Durian	1006	452	554
4	Dusun Siak	2347	786	1561
5	Dusun Alina	676	304	372

Sumber: Profil Desa Durian, 2022

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Durian tidak bergantung pada satu sektor mata pencaharian saja. Penduduk desa menggeluti beragam profesi, seperti petani, buruh tani, buruh migran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, peternak, dan profesi lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat di Desa Durian.

Tabel 2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Durian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1300
2	Buruh tani	1.096
3	Buruh migran	58
4	PNS	26
5	Pengrajin industri rumah tangga	
6	Peternak	30
7	Bidan swasta	2
8	Perawat Perawat swasta	2
9	Pembantu RT	580
10	TNI	11
11	POLRI	6

12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2
13	UMKM	43
14	Dukun kampung terlatih terlatih	5
15	Pengusaha besar	3
16	Karyawan swasta	154
17	Karyawan perusahaan pemerintah	300

Sumber: Profil Desa Durian, 2022

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Durian bekerja sebagai petani, dengan jumlah mencapai 1.300 jiwa, diikuti oleh buruh tani sebanyak 1.096 jiwa.

Desa Durian memiliki luas 42.000 Ha yang terbagi menjadi lima dusun. Adapun dusun dusun tersebut sebagai berikut. a. Dusun Sale : Luas 16 % b. Dusun Bale : Luas 12 % c. Dusun Durian : Luas 18 % d. Dusun Siak : Luas e. Dusun Alina : Luas 8 %. Wilayah desa yang luas merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, terutama tentang pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi sarana utama mobilisasi masyarakat. Sejarah awal pembangunan jalan ini berasal dari usulan masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengakses jalan keluar masuk Desa Durian, oleh karena itu masyarakat menginginkan pembangunan jalan untuk mempermudah mereka melakukan aktifitas sehari-hari. Sebelum adanya pembangunan, jalan di daerah tersebut merupakan tanah merah, apabila cuaca hujan akses jalan desa menjadi berlumpur hingga banyak kendaraan terjebak di dalamnya, hal ini menjadi faktor penghambat distribusi barang atau mobilitas masyarakat. Program pembangunan di Desa Durian sudah dimulai atau direncanakan pada tahun 2013, namun baru direalisasikan pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018 pembangunan tersebut melakukan betonisasi dari Dusun Sela hingga ke Dusun Bale. Tahun 2019 melanjutkan betonisasi di Dusun Durian sampai ke Dusun Siak, semua anggaran pembangunan jalan ini berasal dari dana APBDDes. Jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut Rp. 194.722.000 dari total keseluruhan anggaran Rp. 486.806.000 di Desa Durian.

Semua dusun mendapatkan program pembangunan jalan, namun terdapat 1 RT di Dusun Bale yang tidak mendapatkan program pembangunan jalan yaitu RT 06/RW 02, wilayah tersebut tidak mendapatkan jatah anggaran lanjutan pembangunan jalan karena adanya peraturan Bupati Kubu Raya no 98 tahun 2020 dan np 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, adanya pemangkasan anggaran alokasi penggunaan APBDes 40 untuk infrastruktur. Sehingga menyebabkan adanya wilayah yang tidak dapat melanjutkan pembangunan jalannya.

Jalan yang menjadi tumpuan utama masyarakat di dusun Bale dalam melakukan aktivitas dan sementara kondisi jalannya tidak memadai (rusak), sehingga masyarakat mulai mencari alternatif solusi lain selain bantuan dari desa, yaitu dengan dana aspirasi dewan. Pembangunan jalan di Dusun Bale RT 06/RW 02 diawali dengan adanya bantuan dana aspirasi Dewan Legislatif. Berikut adalah dokumentasi dari jalan hasil bantuan dari anggota Dewan Legislatif dengan panjang 50 M dari awal masuk jalan RT 06/RW 02.

Gambar 2. Pembangunan Jalan Bantuan Anggota Dewan



Adanya bantuan dari dewan legislatif, memantik masyarakat untuk berinisiatif melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 50 M yang merupakan sisa dari pembangunan dari dewan. Pada bulan Maret tahun 2022, adapun peran yang dilakukan masyarakat sebagai berikut:

### **Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)**

#### **1. Musyawarah bersama masyarakat**

Di Dusun Bale terdapat LSM yang bernama IPPA (Ikatan Pemuda Parit Akop), LSM ini dibentuk tahun 2019 yang terdiri dari pemuda-pemuda yang peduli dengan perkembangan desanya, pemuda ini terdiri dari pelajar dan mahasiswa serta tokoh pemuda yang aktif melakukan kegiatan pemudaan serta membantu pembangunan desa. LSM IPPA juga turut peduli dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga mereka mencari alternatif pembiayaan lain untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai oleh dewan. Beberapa alternatif upaya yang dilakukan adalah diskusi dirumah Kepala Dusun dengan melibatkan beberapa unsur seperti Kepala Dusun Balek, tokoh pemuda, agama, adat dan pak RT 06 membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melanjutkan pembangunan jalan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil diskusi tersebut menemukan titik tengah yaitu melanjutkan pembangunan jalan dengan biaya patungan dari masyarakat. Diskusi serupa dilakukan beberapa kali sehingga mendapat satu kesepakatan bersama yaitu tentang penentuan jumlah iuran dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

#### **2. Penggalangan Dana**

Setelah adanya kesepakatan bersama maka, masyarakat mulai melakukan penggalangan dana yang di inisiasi dan pengumpulan dananya melalui LSM IPPA. Kemudian jika uang sudah terkumpul LSM IPPA yang akan membelanjakan material yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan, seperti pasir, batu, semen dll. Peran dari LSM selain sebagai insiator juga sebagai kolektor dan eksekutor dalam setiap keputusan berupa kegiatan bersama dengan masyarakat. Uang iuran hanya untuk membeli keperluan material saja, namun pengerjaannya dengan sistem gotong royong tidak membayar jasa pembangunannya.

## Peran Masyarakat

### 1. Iuran

Peran masyarakat sebagai perencana (yang dilakukan oleh perwakilan unsur masyarakat), kerjasama dan pengawasan dengan saling mengontrol satu sama lain termasuk pada kualitas pekerjaan jalan (masyarakat beranggapan bahwa ini jalan bersama yang dibangun melalui uang mereka sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar jalannya tahan lama). Peran masyarakat sebagai kerjasama adalah masyarakat melakukan iuran sebesar Rp.20.000. Setiap minggu terkumpul sebesar Rp.600.000, uang iuran tersebut dikumpulkan secara kolektif kepada LSM sebagai koordinator pembangunan. Setelah terkumpul uang akan dibelanjakan material pembangunan, hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan”

*“ia kami iuran kumpul duit, biasanya minggu ke dua terkumpul uangnya sampai Rp.1.000.000, baru dibelikan bahan material berupa pasir dan semen, biar gak bolak balik karena biar sekaligus diantar oleh toko bangunannya, belinya di kota”* (wawancara dengan ketua LSM IPPA, 2023).

Setelah tersedia material bahan pembangunan jalan, masyarakat melakukan gotong royong, iuran tersebut dilakukan sebanyak 10 kali hingga selesai pembangunan jalan. Dengan adanya iuran memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun jalannya dan menumbuhkan rasa percaya diri antar masyarakat. Hal tersebut senada dengan penelitian (Ahmad, 2019), yang mengemukakan bahwa dengan adanya iuran Rukun Tetangga (RT) sangat penting untuk keperluan mitigasi bencana.

Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya iuran bersama, “yah bersyukur sekali karena adanya iuran ini, jadi tidak memberatkan semua ditanggung bersama kalau mengharapkan dana pemerintah sampai kapan nunggu kan, baik kita kerjakan sama-sama dan Alhamdulillah selesai” (wawancara dengan informan perwakilan masyarakat, 2023). Adanya ide melakukan iuran memberikan jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akses jalan dan mobilitas hasil pertanian dari desa ke kota.

Gambar 3. Jalan 50 M dibangun masyarakat



### 2. Gotong Royong

Gotong royong dilakukan oleh masyarakat atas kemauan sendiri untuk mencapai tujuan bersama, tanpa mengharapkan imbalan (Wirawan, 2015). Setiap hari Rabu pada pekan ke dua, masyarakat melakukan gotong royong

pada pukul 19.00 hingga 22.00 yang kegiatannya adalah mengecor jalan sepanjang 50 M, lebar 50 CM dan ketebalannya sebesar 10 CM. Selain hari Rabu, masyarakat juga melakukan gotong royong pada Minggu pagi pukul 07.00 hingga 10.00 untuk membersihkan pengairan daerah karena menumpuknya lumpur dan sampah. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong terdiri dari 15-25 laki-laki dan ada pula keikutsertaan 5 perempuan yang menyediakan makanan dan minuman untuk melancarkan kegiatan gotong royong.

Gotong royong yang dilakukan masyarakat sangat membantu dalam proses pembangunan jalan, seperti yang disampaikan oleh informan yaitu bapak RT

*“kita tau bahwa ongkos tukang itu mahal, belum lagi jika ada mandornya tentu kami gak mampu membayar tukang dan mandor, belum lagi mau beli material kan, berat lah, alhamdulillahnya masyarakat disini kompak dan mau meluangkan waktunya untuk gotong royong jadi ringanlah pengeluaran yang fokus pada pembelian bahan bangunan karena gak bayar biaya tukang lagi”* (wawancara informan pak RT, 2023)

Pada masyarakat Dusun Bale ini ada yang menarik, terdapat sanksi sosial yang tidak tertulis yaitu ada beban moral jika tidak mengikuti kegiatan bersama seperti gotong royong pembangunan jalan ini, ada satu kebiasaan yang mereka lakukan yaitu meluangkan waktu untuk gotong royong bagi bapak-bapak atau laki-laki, dan untuk ibu-ibu atau perempuan menyiapkan hidangan seperti gorengan, kopi, kue dan sejenisnya. Jika ada diantara mereka yang selama 1 bulan tidak pernah ikut gotong royong karena kesibukan bekerja dan sejenisnya, maka mereka akan mengutus salah satu anggota keluarganya untuk menggantikan gotong royong tersebut, jikapun tidak maka akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu gotong royong tersebut. Pada akhirnya semua masyarakat berkontribusi dengan perannya masing-masing.

Gambar 3. Gotong Royong masyarakat membersihkan parit



## KESIMPULAN

Pembangunan jalan menjadi salah satu hal utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktifitas di dalam kehidupannya. Beberapa upaya sebagai bagian dari peran masyarakat dalam pembangunan jalan di RT 06/RW 02 Dusun Bale adalah melakukan penyampaian aspirasi dewan sehingga mendapatkan bantuan pembangunan 50 M, selanjutnya pembangunan dilakukan melalui swadaya masyarakat dengan iuran sebanyak 10 kali setiap minggu Rp. 20.000/ KK yang didahului dengan inisiasi oleh LSM IPPA. Peran dari masyarakat sebagai perencana, pelaksana n pengawas dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut.

## REFERENSI

- Adeliya, N., Widodo, R., & Zuriah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>.
- Afriska, M. (2017). PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
- Ahmad Zuber. (2019). Modal Sosial dan Mitigasi Bencana (Studi Kasus di Desa Sapen, Kabupaten Mojolaban, Provinsi Jawa Tengah). *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.583>.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Herdiansah, A. G. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1). <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.556>.
- Juwita, R., Roza, N., & Mulkhairi, I. (2019). Artikel Konsep dan Peranan Agen Perubahan. *Makalah Ilmiah - Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1).
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Miles, M. B. H. A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (3rd ed.). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Munir, M. S. (2023). Pembangunan Infrastruktur Fisik Harus Merata, <https://pontianakpost.jawapos.com/berita->

- utama/01/06/2023/pembangunan-infrastruktur-fisik-harus-merata/diakses 4 juni 2023.
- Perkasa, A (2016) Dana Desa : Ini Jenis Infrastruktur Prioritas di Desa, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160307/9/525767/dana-desa-ini-3-jenis-infrastruktur-prioritas-di-desa>, di akses 4 juni 2023.
- Rasadi, A., Hidayat, B., & Ophiyandri, T. (2020). Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari/Desa Inderapura Selatan). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(4). <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i4.7911>.
- Regy, M. INDEKS DESA MEMBANGUN DAN KONDISI DESA DURIAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANGKABUPATEN KUBU RAYA SAAT WABAH COVID-19. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 10(2).
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.
- Sawelet, A., Nirahua, S. E. M., & Saija, V. J. E. (2022). Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Silmi, A. F. (2017). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) DI DESA TERPENCIL: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05>.
- Simanjuntak, B., Azwansyah, H., & Juniardi, F. Studi Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Kecamatan Sungai Ambawang). *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 1(1).
- Sinaga, A. M. M. (2022). MENILAI PROSES PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA, INDONESIA. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, 4(2). <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98>.
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2).
- Siregar, S (2023). Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Harus Jadi Prioritas Pemkab, <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/kuburaya/29/05/2023/peningkatan-pembangunan-infrastruktur-jalan-harus-jadi-prioritas-pemkab/diakses 4 juni 2023>.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).